



Judul : Banyak Bilik & Kertas Suara Rusak, Bisa Ganggu Pemilu?
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Banyak Bilik & Kertas Suara Rusak, Bisa Ganggu Pemilu?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan banyak logistik Pemilu yang rusak di sejumlah daerah. Sejauh ini, temuan itu terjadi pada pendistribusian tahap I dan II. "Bawaslu mencatat, kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Hasil pengawasan menemukan, bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota, serta segel yang rusak di 30 kabupaten/kota," ujar anggota Bawaslu Herwyn Malonda. Selain kerusakan, ditemukan juga adanya kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I di 10 kabupaten/kota. Herwyn pun mengaku bahwa Bawaslu kesulitan memaksimalkan proses

pengawasan distribusi logistik tahap I. Tahap ini berlangsung selama 13 September-11 November 2023. "KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik," tambah Herwyn. Hal yang sama juga terjadi dalam distribusi logistik Pemilu tahap II yang berlangsung sejak 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024. Sejauh ini, pihaknya juga telah mencatat kerusakan surat suara di 127 kabupaten/kota, dan jumlah surat suara yang belum sesuai di 61 kabupaten/kota. Permasalahan yang sama juga ditemukan dalam distribusi logistik Pemilu di luar

negeri (LN). Bawaslu mencatat adanya surat suara yang tidak tepat jumlah di 29 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), kelebihan surat suara di 32 PPLN, dan kelebihan surat suara untuk TPS LN di 14 PPLN. Ada juga masalah kelebihan surat suara untuk kotak suara keliling (KSK) yang tersebar di tiga PPLN. Selain itu, kelebihan surat suara untuk metode POS di 3 PPLN, kekurangan surat suara di 20 PPLN, dan kerusakan surat suara di 39 PPLN. Herwyn pun meminta KPU untuk lebih profesional. Selain itu, Bawaslu juga meminta agar KPU maupun pihak ketiga yang mengurus logistik Pemilu agar

mencetak dan mendistribusikan, bisa sesuai dan memenuhi standar. "Serta, memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien," ucapnya. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Guspardy Gaus mengatakan, KPU dan pihak ketiga yang mengurus logistik Pemilu harus bertanggung jawab. Untuk itu, Guspardy akan mengusulkan agar Komisi II DPR segera memanggil KPU untuk mengklarifikasinya. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Herwyn Malonda dan Guspardy Gaus.